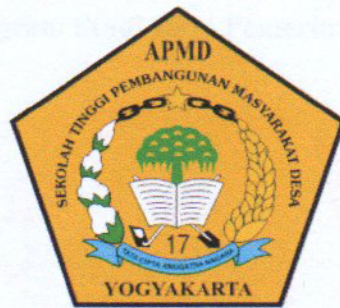


SKRIPSI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENANGANAN *STUNTING* DI DESA TUMBANG LANGGAH
KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



Disusun Oleh :

GENI SAPUTRA

18520254

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-I
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENANGANAN *STUNTING* DI DESA TUMBAH LANGGAH
KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan Memenuhi Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang

Pendidikan Strata Satu (SI)

**APMD
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh :

GENI SAPUTRA

17 18520254 NAGARI

YOGYAKARTA



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

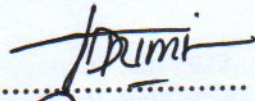
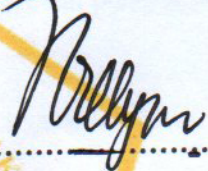
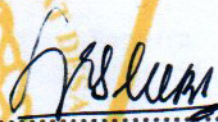
Hari : Senin

Tanggal : 18 Juli 2022

Jam : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.SI</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Penguji Samping I	
3. <u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penjuji Samping II	



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Geni Saputra

Nim : 18520254

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 07 Juli 2022
yang membuat pernyataan



Geni Saputra
Nim 18520254

MOTTO

“Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa
depan, tanpa pendidikan Indonesia tak
mungkin bertahan”
(Najwa Shihab)

“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu
waktu atau orang yang tepat. Kita adalah
perubahan itu sendiri”
(Barack Obama)

“Pendidikan merupakan hiasan kemakmuran serta tempat perlindungan dalam
kesulitan”
(Aristoteles)

“Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia”
(Nelson Mandela)

“Jangan pernah berhenti bermimpi karena mungkin suatu saat nanti, mimpi kalian”
akan jadi kenyataan
(Bambang Pamungkas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Ibadah serta berdoa dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku yang ku sayangi dan kucintai, Bapak saya Gelvia dan ibu saya Mariani serta almarhum kakek saya Warthel yang telah membesarkan saya, mendidik saya dan sudah memotivasi saya. Terima kasih bapak ibu yang sudah berjerih payah, tenaga, pikiran, dan selalu berdoa untuk anak mu untuk semangat dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi selama ini.
2. Untuk kakak dan adikku, Rilina Yesenia, Herviana, Gracia Triviana terima kasih telah menjadi penyemangat sekaligus menjadi penghibur.
3. Ibu Dra, Tri Daya Rini, M.Si beserta suaminya. Terima kasih selama ini sudah membimbing saya mulai dari awal sampai akhir jasa ibu tidak akan pernah saya lupakan selamanya.
4. Untuk keluarga dari pihak bapak dan ibu ku yang ku sayangi dan kucintai yang tidak bisa sebut kan satu persatu, terima kasih yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada saya.
5. Seluruh dosen pengajar yang saya banggakan, terima kasih atas bimbingannya selama ini, terima kasih untuk ilmu dan pelajaran hidup yang sudah bapak ibu dosen pengajar berikan kepada penulis.
6. Untuk semua teman-teman kelas dari semester 1 sampai sekarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman sekaligus

sahabatku selama ini, semoga kita semua selalu sukses dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.

7. Untuk Almamater saya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas segala jasa yang sudah diberikan kepada penulis, penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih belum sempurna. saran dan kritik yang dapat membuat penulisan lebih baik lagi, sangat diharapkan oleh penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas berkat dan tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD/APMD Yogyakarta.

Setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis dalam mengkaji masalah ini. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan, dan kesulitan yang ditemui. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Bapak Drs. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra, Tri Daya Rini, M.Si telah sabar membimbing penulis dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Gelvia selaku Pj Kepala Desa Tumbang Langgah beserta aparat Desa dan unsur masyarakat Desa Tumbang Langgah yang telah memberikan izin penelitian dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini, serta memberikan dukungan kepada peneliti.

Yogyakarta, 07 Juli 2022
Penulis

Geni Saputra
Nim 18520254

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Literatur Review	10
F. Kerangka Konseptual.....	15
1. Kebijakan Publik	15
2. Kebijakan Pemerintah Desa.....	20
3. Penanganan Stunting	22
G. Ruang Lingkup Penelitian	25
H. Metode Penelitian.....	26
BAB II PROFIL DESA TUMBANG LANGGAH KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	31
1. Gambaran Umum Desa Tumbang Langgah.....	31
2. Letak dan Batas Wilayah.....	31
a. Kondisi Demografis	32
1. Jumlah Penduduk	32
2. Komposisi Ekonomi Penduduk Menurut Umur	33
3. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan.....	35
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	35
5. Kesejahteraan Keluarga	36
6. Status Gizi Balita	37
7. Jumlah <i>Stunting</i>	37
8. Lembaga Penanganan <i>Stunting</i>	38
9. Komposisi Berdasarkan Pendidikan	39

10. Sarana Pendidikan.....	39
11. Fasilitas Umum	41
12. Struktur Organisasi Kantor Desa Tumbang Langgah Kecamatan RunganBarat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.	42
13. Kondisi Pemerintahan	45
14. Data Keuangan.....	45
BAB III	47
Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penanganan <i>Stunting</i>	47
1. Kebijakan Pemerintah Desa.....	47
2. Perencanaan Program Pemerintah Desa.....	55
3. Sosialisasi Pemerintah Desa	59
4. Tindakan Pemerintah Desa.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	49
Lampiran	51
Pedoman Wawancara.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus <i>Stunting</i> di Desa Tumbang Langgah Pada Tahun 2020-2021.....	6
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 1. 3 Deskripsi informan berdasarkan status jabatan.....	27
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Desa Tumbang Langgah pada tahun 2021	33
Tabel 2. 2 Jumlah Ekonomi Penduduk Berdasarkan Umur	33
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	35
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	36
Tabel 2. 5 Tingkat Kesejahteraan Keluarga.....	36
Tabel 2. 6 Lembaga Penanganan <i>Stunting</i>	38
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 2. 8 Prasarana dan Fasilitas Umum.....	41
Tabel 2. 9 Identitas Struktur Pemerintah Desa Tumbang Langgah	44
Tabel 2. 10 Lembaga Pemerintahan Desa Tumbang Langgah	45
Tabel 2. 11 Data Keuangan Desa Tumbang Langgah.....	46
Tabel 3. 1 Jumlah Peningkatan Kasus <i>Stunting</i> 2021	50

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal (1) ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pencegahan dan penanganan *stunting* masih bisa dikatakan kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah balita yang masuk kategori *stunting*, di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas yang semakin meningkat, tercatat pada tahun 2020 ada (18) balita yang masuk *stunting* dan mengalami peningkatan berdasarkan pendataan pada tahun 2021 bertambah menjadi (22) balita yang terkena *stunting*. Selama kurang lebih dari satu tahun kasus *stunting* di Desa Tumbang Langgah bertambah (4) orang dari tahun sebelumnya.. Desa Tumbang Langgah adalah salah satu desa dengan kasus *stunting* yang cukup tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Stunting. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui studi penelitian kebijakan pemerintah desa dalam penanganan dan tindakan serta upaya untuk menangani *stunting* di tingkat desa adalah eksploratif secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Penentuan informan ditentukan peneliti meletakkan unit analisis pada obyek dan subyek penelitian. Teknik analisis data secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting ini terdiri dari empat bagian antara lain Kebijakan. Pemerintah desa dalam penanganan *stunting* adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan posyandu dan kader KPM, dengan kegiatan posyandu dilakukan secara rutin setiap bulan sekali oleh tenaga kesehatan dan dibantu oleh KPM dan kader posyandu, selebihnya didukung oleh kebijakan dari pemerintah desa yaitu dana yang di anggarkan untuk penanganan *stunting*. Program. Pemerintah desa dalam bentuk pemenuhan gizi nabati yaitu pemberian makanan tambahan yang bergizi dan vitamin program berkebun singkong,ubi namun untuk program pemenuhan gizi dari protein hewani belum ada dilakukan padahal protein dari hewani juga penting untuk dilakukan dalam pemenuhan gizi pada anak balita. Sosialisasi dilakukan tidak hanya berupa penyampaian tentang pencegahan dan penanganan *stunting* akan tetapi juga ada berupa praktek pengolahan makanan bergizi seperti makanan tumbuhan ubi,singkong untuk peningkatan perbaikan kualitas gizi pada anak balita yang masih bersifat nabati sedangkan untuk hewani belum dilakukan.Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu perencanaan penganggaran dana yang dianggarkan dan program berkebun pemberian makanan tambahan seperti susu kacang hijau yang bersifat gizi dari nabati namun dari hewani belum ada dilakukan

Kata kunci : Kebijakan Pemerintah Desa Penanganan *stunting*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Bab III pasal (10) ayat (1) sampai ayat (3).

1. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
3. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan dan

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

pasal (11) ayat (1) sampai (3) menyebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
2. Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
3. Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bahwa mengenai kebijakan penanganan *stunting* langsung dari pemerintah pusat lalu di limpahkan kepada pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah daerah provinsi melimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan selanjutnya di tingkat pemerintah desa maka dari itu pemerintah desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kepemimpinannya

Adapun Tugas pokok dan Fungsi Pemerintah Desa menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Mengajukan rancangan peraturan Desa. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Dengan

wilayah yang luas dan memiliki berbagai keanekaragaman, tentu membuat Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya. Namun, seperti yang diketahui bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tentunya masalah-masalah inilah yang masih menghambat kemajuan bangsa Indonesia. salah satu masalah yang dihadapi adalah *stunting*.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak karena akibat kekurangan gizi sehingga anak terlalu pendek untuk usia *stunting* tidak bisa dianggap sepele oleh semua pihak karena hal ini dapat berakibat pada kualitas dari anak-anak yang nantinya menjadi penerus bangsa. adapun yang ditimbulkan masalah *stunting* antara lain meliputi fisik anak seperti berat dan tinggi badan yang tidak baik. Selain fisik perkembangan otak anak juga akan terhambat. Serta beresiko tinggi mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas stroke dan penyakit jantung saat anak berusia dewasa nanti.

Bagaimana jika anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia memiliki kualitas pertumbuhan yang kurang baik. Hal ini bisa menyebabkan kemajuan bangsa menjadi terhambat. Selama ini pemerintah sedang bekerja keras untuk menangani atau mengatasi masalah *stunting* hal ini terbukti dengan adanya “cegah *stunting*” yang belakangan dicanangkan. Pemerintah telah memulai langkah yang baik melalui melalui penggunaan dana desa sebagai upaya untuk pencegahan terhadap *stunting*. Maka dari itu pencegahan terhadap *stunting* tertuang dengan jelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 dan 2. Dalam peraturan tersebut dijelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pencegahan stunting. Keegiatannya yaitu meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita sebagai ketahanan pangan dan lain sebagainya. Dengan demikian pencegahan stunting dilakukan secara terintegrasi hingga tingkat pemerintah desa dengan adanya dana desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* yang terintegrasi. Dana Desa tidak melulu untuk perbaikan sarana dan prasarana fisik namun non-fisik dan sosial kesehatan mutlak perlu juga dikedepankan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah desa dalam pencegahan *stunting* masih bisa dikatakan kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah balita yang masuk kategori *stunting*, di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas yang semakin meningkat, tercatat pada tahun 2020 ada (18) balita yang masuk *stunting* dan mengalami peningkatan berdasarkan pendataan pada tahun 2021 bertambah menjadi (22) balita yang terkena stunting. Selama kurang lebih dari satu tahun kasus *stunting* di desa tumbang langgah bertambah (4) orang dari tahun sebelumnya. Sehingga kasus *stunting* di desa tumbang langgah pada saat ini ada (22) balita. Hal ini terjadi karena kurangnya upaya penanganan atau pencegahan dari pemerintah Desa Tumbang Langgah untuk melakukan penanganan dan pencegahan terhadap kasus *stunting*.

Dengan menyikapi hal tersebut tentunya pemerintah desa tumbang langgah harus mempunyai kebijakan tersendiri dalam kepemimpinan dan tindakannya untuk mengatasi permasalahan stunting ini. Karena dengan adanya suatu tindakan dari pemerintah desa untuk menangani kasus *stunting* setidaknya dapat untuk mencegah dengan melakukan rencana dan pelaksanaan program-program, pembagian vitamin makanan bergizi dan program lainya seperti gotong royong rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya mencegah kasus *stunting*.

Berdasarkan dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah desa tumbang langgah menunjukkan masih kurangnya upaya tindakan pemerintah desa dalam menangani *stunting*. Kebijakan dan tindakan yang telah dilakukan pemerintah desa tumbang langgah sebelumnya yaitu. Melakukan penganggaran dari Dana Desa (DD) melewati kader posyandu balita untuk memberikan susu kacang hijau, sop ayam dan makanan lainya yang bersifat untuk penambahan gizi. Namun pada kenyataannya masih belum bisa untuk mencegah dan mengurangi kasus *stunting* di Desa Tumbang Langgah. Pada tahun 2020. baru masuknya program pemerintah pusat “cegah *stunting*” khususnya di desa tumbang langgah, Adapun jumlah kasus stunting tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus *Stunting* di Desa Tumbang Langgah Pada Tahun 2020-2021

No	Tahun 2020	Tahun 2021
	Nama	Nama
1	Adela	Amelia
2	Amelia	Astrid
3	Andre	Dara
4	Astrid	Farel
5	Farel	Marsha
6	Marsha. angelina	Milka
7	Milka	Maura
8	Noor cahaya putri	Noor cahaya
9	Rafi	Rangga
10	Rahmat kelvino	Subrianto
11	Rangga	Winda
12	Sherly	Jelsi
13	Subrianto	Selda
14	Selda	Ferdinan
15	Nelly berti	Alvian . naparel
16	Jelsi	Delka
17	Alvian naparel	Nelly berti
18	Ferdinan	Dion. pratama
19	-	Sukli
20	-	Nopendra
21	-	Andra
22	-	Andri
	Jumlah	22

Sumber : Data Pemerintah Desa Tumbang Langgah Tahun 2020-2021

Pada tabel yang telah dipaparkan di atas maka dapat diketahui jumlah peningkatan kasus *stunting* pada tahun 2020-2021. Dari peningkatan kasus tersebut pemerintah desa tumbang langgah segera membuat kebijakan baru dan tindakan yang nantinya dapat untuk mencegah bertambah nya kasus *stunting* ini. Maka perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana upaya

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam menyikapi *stunting*. Dari penelitian ini agar nantinya bisa mendapatkan jawaban atau solusi untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan *stunting* yang ada di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung mas dalam hal ini pemerintah desa yang terkait masyarakat dan langsung orang tua dari anak-anak yang masuk dalam kategori *stunting* dan berbagai Lembaga sosial lainnya seperti Kader KPM dan Kader Posyandu selainya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat dikarenakan wilayah ini menjadi desa dengan kasus *stunting* yang sangat tinggi. sehingga tercatat kasus *stunting* ini pada urutan nomor (1) dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hal ini menjadi dasar pemilihan lokasi oleh peneliti.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan ilmu pemerintahan untuk mengetahui persoalan dalam Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting*. Penelitian ini berfokus pada tindakan pemerintah desa

dalam penanganan *stunting* di Desa Tumbang langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung mas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kebijakan Desa dalam upaya penanganan *stunting* di Desa Tumbang langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk menggambarkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam penanganan *stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama yaitu manfaat secara akademis dan kategori ke dua yaitu manfaat secara praktis. Berikut penjelasan manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat akademis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi serta menjadi data bagi bidang pengetahuan

b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti lain yang tertarik dalam mengambil judul Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting*.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi untuk masyarakat agar dapat mendukung kebijakan yang telah dibuat pemerintah desa dalam menangani *stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.

b. Bagi peneliti, memberikan pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam kebijakan pemerintah desa terhadap penanganan *stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas dan sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana strata satu (S1) jurusan ilmu pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

c. Bagi pemerintah desa tumbang langgah dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang penanganan *stunting* agar dapat melakukan program-program yang sesuai dengan arahan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang *Stunting* yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian
1	Andi Sri Sulastri (2020)	Model Perumusan Kebijakan Stunting	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian. perumusan kebijakan stunting di Desa Labbo Kabupaten Bantaeng belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah, infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan kualitas SDM terhadap masyarakat Kabupaten Bantaeng. Faktor yang mempengaruhi Perumusan Kebijakan stunting dapat diketahui bahwa untuk menilai keefektifan pemerintah dapat dilihat dari beberapa faktor yang diantaranya ialah, kesehatan masyarakat desa yang kurang cukup meningkat, kesadaran masyarakat tentang kesehatan yang menunjukkan grafik peningkatan dan pola hidup sehat yang mulai diterapkan pada

				masyarakat yang ada di desa.
2	Febi Rama Silpia (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting Gangguan Pertumbuhan Pada Anak	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan melalui beberapa tahapan yaitu Tahap penyadaran, yaitu dengan sosialisasi, Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan yang terakhir Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pola kemandirian, masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, yaitu dipantau dengan posyandu. Pembinaan terhadap masyarakat dalam penanggulangan stunting

				dikatakan berhasil, karena dengan adanya program tersebut penderita stunting di desa pancasila dari 30 orang di tahun 2017 sekarang menjadi 12 orang, dan masyarakat sudah mengerti tentang gaya hidup sehat.
3	Evalia Nuranita, Herbasuki Nurcahyanto (2021)	Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup efektif dengan melihat fenomena dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat melalui kader stunting yang masih rendah, dominasi bidang kesehatan dalam penanganan stunting di Desa Kalirandu, rendahnya komitmen kepala desa dan masalah pengunggahan data. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumberdaya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.

4	Mirawati Tongko ¹ , Erik Pradana Budi (2020)	Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan stunting dalam hal peningkatan gizi masyarakat yaitu dengan pemberian makanan tambahan pada balita dan lansia, sedangkan dalam hal sanitasi berbasis lingkungan yaitu telah diupayakannya pengadaan sarana jamban dan air bersih pada setiap desa, selain itu sudah ada dalam rencana APBDES untuk peningkatan anggaran dalam penyelenggaraan jamban sehat, serta pembangunan air minum dan sanitasi yang sudah mencapai 100%. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan melalui kerja sama dengan pihak puskesmas yang melibatkan pemerintah desa beserta tokoh masyarakat untuk upaya peningkatan pengetahuan tentang stunting, serta masyarakat berperan aktif untuk mengikuti program kesehatan dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat. Adapun saran yaitu perlu adanya pemantauan berkala dari pemerintah daerah terhadap
---	--	--	--------------------------	---

				kegiatan-kegiatan penanggulangan stunting yang dilakukan oleh setiap pemerintah Desa yang ada.
5	Kostadia Yunita San Roja (2017)	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kasus gizi buruk di Kabupaten Sikka belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya regulasi yang jelas dari Pemerintah Daerah, infrastruktur kesehatan yang belum memadai dan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Sikka.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas mengenai penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan diantaranya pembahasan tentang stunting. Namun saat ini belum ditemukan penelitian terdahulu tentang Kebijakan Pemerintah Desa dalam penanganan stunting di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting. Hal ini dimaksudkan agar masalah dalam pelaksanaan program penanganan stunting dapat teratasi guna untuk mencegah jumlah stunting di tahun selanjutnya. Dengan demikian program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Tumbang Langgah.

F. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Carl Friedrich (1963:56). Bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Menurut Richard Rose (1969:6). Berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri. Dari beberapa definisi di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan dan keputusan yang dilakukan pemerintah bersama anggota organisasi pemerintah tersebut dengan mempunyai maksud tujuan tertentu guna untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

Jenis-jenis Kebijakan Publik Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James

Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansi tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif (27) Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan material versus kebijakan simbolik Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (private goods) Kebijakan public

goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Ciri-Ciri Kebijakan Publik Menurut Suharno (2010:22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

a. **Pemerintah**

Menurut Strong dalam bukunya Syafiie, (2002:12) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Syafiie (2003:136) menyatakan Pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat

dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

b. Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Widjaja (1999:19) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

a) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

b) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa:

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

c) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa:

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

2. Kebijakan Pemerintah Desa

Menurut Purwanto (2015:106-110), ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja implementasi kebijakan:

1. Akses yang mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apapun karakteristik individu maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti gender, etnisitas, agama dan afiliasi politik. Akses juga berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu atau kelompok.
2. Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementor biasa

menyimpang kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran untuk menikmati bantuan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

3. Ketepatan layanan

indikator ini digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan dalam implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak.

4. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementor dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluar kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggung jawabkan atau tidak.

5. Kesesuaian Program dan Kebutuhan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program yang diterima oleh kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

Subarsono (2001:102), menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai

pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri.

Menurut Hogwood dan Gunn Wahab, (1997:71-81) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana
2. Tersedia waktu dan sumber daya
3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal

Dalam Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Menurut Lusia Palulungan (2020:10) dalam buku yang berjudul mengubah Kebijakan Publik di Desa. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberi kewenangan membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), Peraturan bersama kepala desa, dan Peraturan kepala desa. Perdes adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan kebijakan pemerintah desa adalah perbuatan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri dengan tujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi.

Penelitian ini menggunakan sudut pandang Governing G2 yaitu mengkaji dan melihat perbuatan dan aktivitas Pemerintah Desa Tumbang langgah dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di daerahnya sendiri.

3. Penanganan *Stunting*

Peraturan Bupati No 34 Tahun 2020 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Berskala Desa menimbang bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Gunung Mas, sehingga diperlukan upaya serta daya dukung anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekurangan gizi kronis stunting berskala desa.

Berdasarkan ketentuan pasal (74) ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mengatur belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah dan pada ayat (2) mengatur kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yang salah satunya prioritas pencegahan dan penanganan kekurangan gizi stunting berskala desa. Jurnal Iren Ressie Ridua 1), Gloria Miagina Palako Djurubassa (2020). Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tubuh pendek. Penderita stunting pada umumnya rentan terhadap penyakit memiliki tingkat kecerdasan dibawah normal serta produktivitas rendah. Tingginya prelevansi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi indonesia (Aryastami,2017).

Faktor stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil maupun anak balita (Sri Mugianti, Arif Mulyadi, Agus khoirul Anam, 2018). Beberapa faktor penyebab stunting sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan ibu tentang kesehatan anak,
2. Pola asuh yang salah,
3. Ekonomi keluarga dimana tidak mampu membeli atau menyediakan bahan makanan,
4. Pola konsumsi yang salah,
5. Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai,
6. Sanitasi tidak layak,
7. Kurangnya asupan gizi,
8. Lingkungan yang kotor,

9. BPJS kesehatan yang belum terdistribusi dengan benar.

Kerangka konseptual merupakan alur konsep-konsep yang diambil dari berbagai teori yang dianggap relevan dengan fokus atau judul penelitian ini. dalam upaya menjawab masalah-masalah serta terarah sesuai dengan permasalahan yang ada dirumuskan dalam penelitian. Penelitian ini membahas Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah. Yang menjadi permasalahan adalah belum tepatnya arah tindakan dalam penanganan dan perencanaan program-program pencegahan *stunting*. Dan masih kurangnya sosialisasi tentang tujuan pencegahan *stunting* oleh aparat pemerintah desa kepada masyarakat. Minimnya tingkat kewaspadaan pemerintah desa terhadap kasus *stunting*.

Adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini fokus pada tindakan pemerintah desa dalam penanganan *stunting* di Desa Tumbang Langgah. Dengan menggunakan konsep kebijakan sebagai alur yang diteliti yang meliputi: Tindakan, Perencanaan Program, Sosialisasi Pencegahan *Stunting*. Arah tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

G. Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian penting untuk dilakukan, karena berkaitan dengan masalah, informasi dan data yang akan dikumpulkan sehingga peneliti menjadi terarah dan mudah dalam pengumpulan data/informasi dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan Kerangka Konseptual di atas maka Ruang Lingkup penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Pemerintah Desa Tumbang langgah dalam Penanganan *stunting*
2. Perencanaan Program Pemerintah Desa Tumbang Langgah dalam penanganan *stunting*
3. Sosialisasi Pemerintah Desa Tumbang Langgah dalam pencegahan *stunting*
4. Tindakan Pemerintah Desa Tumbang Langgah dalam penanganan *stunting*

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Rungan Barat khususnya Desa Tumbang Langgah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

1. Lokasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengetahui studi penelitian kebijakan pemerintah desa dalam penanganan dan tindakan serta upaya untuk menangani stunting di tingkat desa adalah eksploratif secara kualitatif.

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahuinya. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. Sugyono (2016:14)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Sugyono (2016:24)

3. Unit analisis

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diatas maka peneliti meletakkan unit analisis pada obyek dan subyek penelitian. Obyek penelitian dalam peneltian ini adalah kebijakan pemerintah desa dalam penanganan *stunting* khususnya dalam tindakan penanganan *stunting* di desa. Sedangkan subyek penelitiannya

Tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1. 3 Deskripsi informan berdasarkan status jabatan

No	Jabatan/Selaku	Jumlah
1	Kepala Desa Tumbang Langgah	1 Orang
2	Ketua BPD Desa Tumbang Langgah	1 Orang
3	Sekretaris Desa Tumbang Langgah	1 Orang
4	Wakil BPD Desa Tumbang Langgah	1 Orang
5	Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan Desa Tumbang Langgah	1 Orang
6	Kepala urusan umum dan perencanaan Desa Tumbang Langgah	1 Orang
7	Kepala seksi pemerintahan Desa Tumbang Langgah	1 Orang
8	Kader KPM Desa Tumbang Langgah	1 Orang
9	Kader posyandu Desa Tumbang Langgah	1 Orang

10	Tokoh masyarakat Desa Tumbang Langgah Ketua Rt 01 Tumbang Langgah Ketua Rt 02 Tumbang Langgah Ketua Rt 03 Tumbang Langgah	3 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2021

4. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* yang terfokus pada tindakan pemerintah desa dalam menangani *stunting* di desa.

5. Jenis Dan Sumber Data

jenis sumber data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen (Dokumen yang dikeluarkan pemerintah desa, laporan-laporan dan arsip-arsip).

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Biasanya dilakukan secara berhadap- hadapan atau face to face dengan seseorang selain itu wawancara juga dapat melalui via telepon maupun focus group dalam melakukan teknik wawancara hal yang paling penting adalah peneliti merekam informasi dari partisipan dengan menggunakan catatan tangan, audiotape, videotape akan tetapi tidak hanya itu saja peneliti juga harus mencatat saat kegiatan wawancara karena meminimalisir kerusakan pada rekaman wawancara sehingga peneliti masih memiliki data yang lainnya. Dengan menggunakan jenis wawancara bebas peneliti hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam wawancara. peneliti langsung mengikuti situasi ketika ada kegiatan di komunitas. Sehingga nantinya peneliti mengetahui apa saja peran-peran kegiatan dalam komunitas. Peneliti melakukan wawancara kepada partisipan berdasarkan karakteristik partisipan yang telah ditentukan. Peneliti akan berperan penuh sebagai observer dan pewawancara. Peneliti akan mencatat semua kejadian dan data, serta informasi dari informan dari informan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam, buku catatan dan kamera. Alat perekam ini digunakan untuk bahan *cross check* apabila saat menganalisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti.

2. Observasi

Dengan mengalami langsung peneliti akan menangkap konteks dimana orang berinteraksi. Peneliti akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif. Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah dalam fokus penelitian yaitu tindakan pemerintah desa dalam penanganan stunting di Desa Tumbang Langgah. Jadi penelitian melakukan pengamatan ke Desa Tumbang Langgah peneliti mengamati kondisi masyarakat, dan juga kegiatan pemerintah desa dalam menangani stunting kemudian peneliti mencatat hasil observasi ke dalam buku catatan.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar dan foto bersama informan tulisan peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (Data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data primer) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data Menurut Sugiyono (2017:308). Kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau

uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

PROFIL DESA TUMBANG LANGGAH KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Gambaran Umum Desa Tumbang Langgah

Desa Tumbang Langgah terletak di Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Asal desa tumbang langgah pada awal mulanya yaitu hanya sebuah dukuh yang dihuni 5 sampai 10 orang dimana, orang-orang itu mencari sebuah wilayah sebagai tempat untuk bekerja dan berladang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, Adapun pekerjaan yang umum dilakukan masyarakat yaitu menyadap karet, dan berladang menanam padi sayur-sayuran dan menanam pohon karet.

Dengan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya masyarakat yang mendukuhi ditempat itu bekerja dan berladang. sehingga pada tahun 1994 dibentuk sebuah dusun yang dijabat oleh Dihel Dherson, selanjutnya pada tahun 2006 Pj kepala dusun dijabat oleh Muris Nanyan dan pada tahun 2008 status yang dulunya Dusun resmi pemekaran desa yang dinamai Desa Tumbang Langgah yang dijabat Oldrin, A T Murai, setelah itu pada tahun 2014-2020 dijabat oleh Satriawan seterusnya tahun 2021-2022 sampai dengan sekarang dijabat Pj kades Gelvia Spd.

2. Letak dan Batas Wilayah

Desa Tumbang Langgah secara geografis terletak di pertengahan antara kedua desa yaitu jarak ke Desa Tumbang Bahanei 0,8 Km dan

sebelah selatan Desa Tumbang Kuayan jarak 0,4 Km dengan kondisi geografis dataran rendah 1.143,00 ha perbukitan 2,00 ha Kawasan rawa 889, ha Kawasan gambut 1,00 ha aliran sungai 30,00 ha bantaran sungai 20,00 ha dengan memanjang pada bagian selatan yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, perkebunan dan wilayah dataranya mulai dari tepi desa tumbang langgah sampai ke daerah perbukitan desa tumbang kuayan sehingga wilayah itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka lahan perkebunan dan berladang. dari luas wilayah desa tumbang langgah terletak di bagian utara sebelum desa tumbang bahanei yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Desa Tumbang Bahanei
2. Sebelah selatan : Desa Tumbang Kuayan
3. Sebelah timur : Desa Batu Puter-Rahuyan
4. Sebelah barat : Kelurahan Rabambang-Tusang Raya

Keadaan iklim letak geografis desa tumbang langgah yang strategis memiliki kondisi alam 3 dimensi yakni, dataran rendah perbukitan aliran sungai, dengan dua musim. Iklim di daerah ini tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-rata 100,00 mm. dengan adanya dari kedua musim tersebut sangat menguntungkan bagi sektor pertanian dan perkebunan.

a. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Desa tumbang langgah adalah sebuah desa yang memiliki luas wilayah 2.602,92 Ha dengan jumlah penduduk 449 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 237 jiwa dan perempuan 212 jiwa yang terbagi dari 3 RT yaitu RT 01-RT 02-RT 03. Berikut jumlah penduduk berdasarkan dari data Profil Desa tahun 2021

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Desa Tumbang Langgah pada tahun 2021

Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Presentase
Laki-laki	237	52,8
Perempuan	212	47,2
Jumlah	449	100

Sumber: Monografi Desa Tumbang Langgah, 2021

Dari data ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduknya di Desa Tumbang Langgah tergolong dengan jumlah laki-laki 237 orang dengan 52,8 persen lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan jumlah 212 orang 47,2 persen.

2. Komposisi Ekonomi Penduduk Menurut Umur

Komposisi ekonomi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Ekonomi Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Jiwa	Status
1	18-56	7	sekolah dan bekerja
2	18-56	214	bekerja penuh
4	18-56	7	Cacat dan tidak bekerja
	Total	214	

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Pada usia produktif bekerja penuh yaitu 18-56 tahun dengan jumlah 214 jiwa yang berarti jumlah yang banyak ini dan jika dilengkapi dengan lapangan pekerjaan akan mampu untuk mengatasi persoalan pengangguran. Sebagian besar bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Sementara untuk usia 18-56 yang masih sekolah dan bekerja sampingan dengan 7 jiwa sedangkan untuk penduduk yang cacat dan tidak bekerja dapat diketahui yaitu 7 jiwa hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah yang bekerja penuh dari yang tidak bekerja atau pengangguran maka dapat diketahui kondisi ekonomi masyarakat untuk mengatasi *stunting* pada anak.

3. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Tumbang Langgah dapat dikatakan lebih banyak petani karena kehidupan mereka dari zaman dulu lebih banyak berkebun dan berladang. Tabel dibawah ini menunjukkan data berdasarkan mata pencaharian pokok penduduk Desa Tumbang Langgah.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah/orang
1	Petani	253
2	Pegawai negeri sipil	3
3	Guru swasta	7
4	wiraswasta	6
5	Perangkat desa	6
6	Pemilik usaha warung dll	3
7	Tukang	3
	Total	281

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Tabel di atas menunjukkan penduduk desa tumbang langgah berdasarkan pekerjaan yang paling banyak yaitu sebagai petani, maka dari itu masyarakat Desa Tumbang Langgah lebih banyak berkebun dan berladang dalam mencukupi kebutuhan ekonomi.

4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Agama adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau individu tanpa adanya paksaan tertentu dari pihak lain,

di Indonesia ada enam keyakinan yang dipercaya yaitu islam, Kristen katolik, Kristen protestan, hindu, budha dan konghucu. Untuk komposisi penduduk desa tumbang langgah berdasarkan agama, sebagaimana bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah/orang	Presentase
1	Islam	27	6
2	Kristen	162	36
3	Hindu	260	58
	Total	449	100

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Berdasarkan data di atas, tampak mayoritas penduduk desa tumbang langgah adalah beragama hindu dengan jumlah sebanyak 260 jiwa dengan presentase 58 oleh karena itu penting untuk pemerintah desa dalam meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat beribadah.

5. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat. maka dari itu, dapat dilihat jumlah tingkat kesejahteraan masyarakat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Tingkat Kesejahteraan Keluarga

No	Tingkat Kesejahteraan keluarga	Jumlah/keluarga
1	keluarga Prasejahtera	12
2	Keluarga Sejahtera 1	108
3	Keluarga Sejahtera 2	5
4	Keluarga Sejahtera 3	0
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	125
	Total	250

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa tumbang langgah cukup tinggi sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan gizi pada masa tumbuh kembang anak.

6. Status Gizi Balita

Status gizi pada balita adalah suatu hal yang perlu diperhatikan maka daripada itu status gizi balita dapat diketahui. (balita bergizi baik 43 orang) dan (balita bergizi kurang 14 orang). status gizi pada balita di Desa Tumbang langgah dapat dikatakan baik dengan jumlah yang paling banyak pada status bergizi baik.

7. Jumlah *Stunting*

Jumlah *stunting* di Desa Tumbang Langgah pada tahun 2020/2021 berdasarkan data yang didapatkan dari kader pembangunan manusia desa

tumbang langgah yaitu. Pada tahun 2020 (18 orang) dan di tahun 2021 (22 orang). Sehingga dari tahun 2020-2021 jumlah *stunting* di Desa Tumbang Langgah sejumlah (22 orang). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui peningkatan *stunting* pada tahun 2020 dan 2021.

8. Lembaga Penanganan *Stunting*

Ada beberapa Lembaga yang terlibat dalam penanganan *stunting* di Desa Tumbang Langgah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Lembaga Penanganan Stunting

No	Jumlah Lembaga	Jumlah orang
1	Kader KPM	1
2	Kader Posyandu	5
3	PKK	5
	Total	11

Sumber: Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Dapat dilihat dari tabel di atas, Jumlah lembaga yang terlibat dalam menangani *stunting* ada tiga lembaga yaitu kader pembangunan manusia, kader pusat pelayanan terpadu dan pembinaan kesejahteraan keluarga.

9. Komposisi Berdasarkan Pendidikan

Komposisi masyarakat berdasarkan Pendidikan jika dikelompokkan maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/orang	Presentase
1	Taman Kanak-kanak (TK)	16	6
2	Sekolah Dasar (SD)	59	22
3	SMP	86	33
4	SMA/SMU	85	32
5	Akademik/D1 - D3	4	2
6	Sarjana/S-1	13	5
7	Pasca Sarjana/S-2	1	0
	Total	264	100

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Tumbang Langgah dengan tingkat pendidikan yang menengah maka dengan adanya program penanganan *stunting* dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa akan sulit berjalan akibat kurangnya kerja sama atau dari segi pemahaman masyarakat dengan faktor kurangnya wawasan pengetahuan masyarakat terhadap kasus *stunting*.

10. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan penting sebagai penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tumbang Langgah. Pendidikan sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia agar dapat berkontribusi dalam setiap rencana pembangunan yang ada di Desa Tumbang Langgah. Oleh karena itu, sarana Pendidikan yang ada dapat diketahui. (gedung TK 1 buah) dan (gedung SD 1 buah). dikatakan lengkap karena belum ada gedung untuk sekolah menengah maupun tingkat atas, dengan adanya kekurangan tersebut akan sulit meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Desa Tumbang Langgah.

11. Fasilitas Umum

Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Adapun fasilitas umum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8 Prasarana dan Fasilitas Umum

No	Fasilitas umum	Jumlah/buah
1	Prasarana Kesehatan	2
	Pustu	1
	Posyandu	1
2	Prasarana Ibadah	3
	Masjid	1
	Gereja	1
	Pura	1
3	Fasilitas Umum	4
	Lapangan sepak bola	1
	Lapangan bulu tangkis	1
	Lapangan voli	2
	Total	9

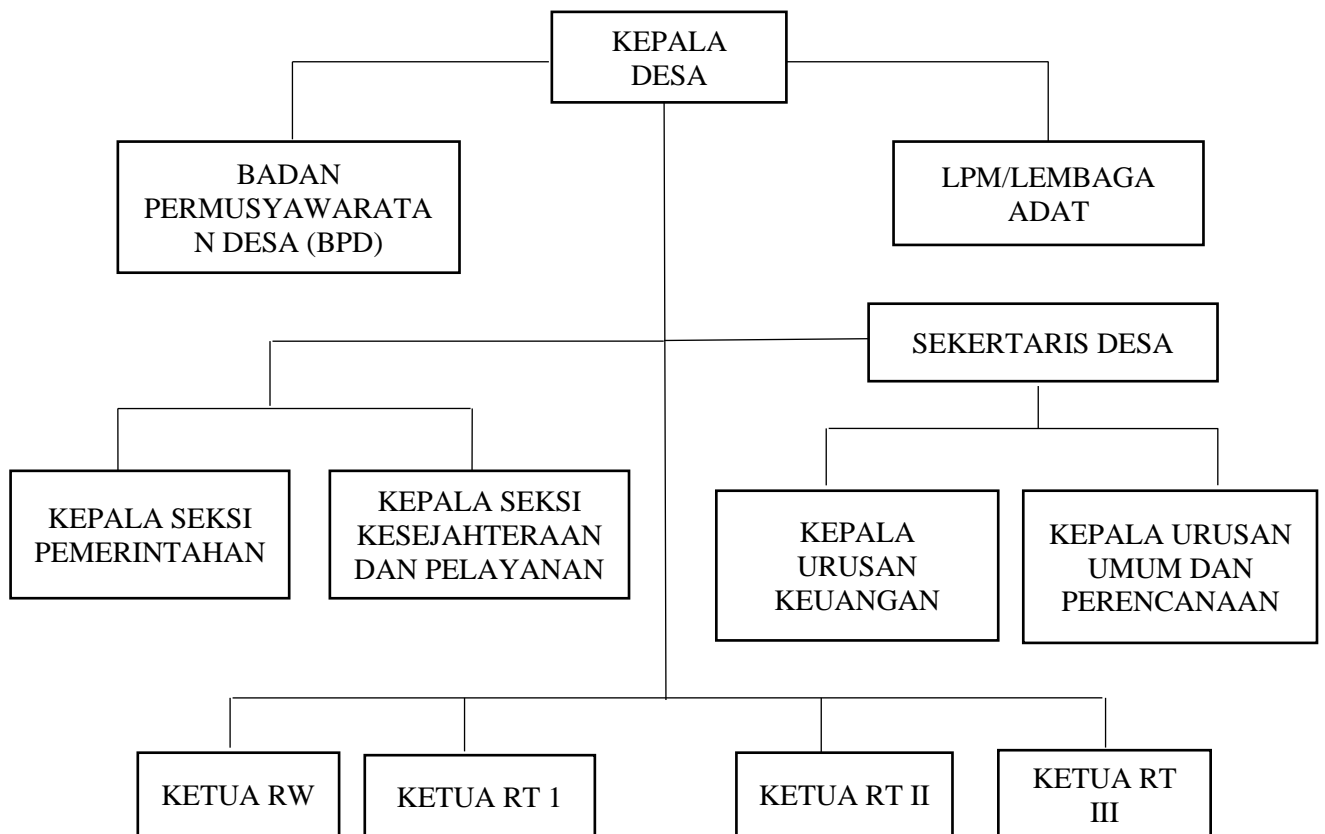
Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa fasilitas umum yang ada di Desa Tumbang Langgah dapat dikatakan belum memadai terutama sarana kesehatan yang hanya 1 unit pustu dengan fasilitas yang masih kurang lengkap, sedangkan untuk sarana tempat peribadatan dan fasilitas umum cukup memadai.

12. Struktur Organisasi Kantor Desa Tumbang Langgah Kecamatan RunganBarat Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut adalah bagan struktur pemerintah desa tumbang langgah beserta tugas dan fungsinya.

Bagan 1.2
Struktur Pemerintah Desa Tumbang Langgah 2022



KETERANGAN:

_____ HUBUNGAN KONSULTATIF KADES DAN BPD

..... HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM

_____ HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA

Kepala Desa Sekretaris Desa dan BPD

- Pelaksanaan urusan umum

- Administrasi data
- Keuangan
- Pelaporan

Kasi Pemerintahan Kesejahteraan Pelayanan Dan Kaur Keuangan
Urusan Umum Dan Perencanaan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan

- Keagrariaan
- Pembinaan pemerintah desa
- Pembangunan

- Rukun warga/RW

- Rukun Tetangga/RT 01

- Rukun Tetangga/RT 02

- Rukun Tetangga/RT 03

Berikut ini adalah Tabel Identitas Struktur Pemerintah Desa Tumbang Langgah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Identitas Struktur Pemerintah Desa Tumbang Langgah 2021

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur/ tahun
1	Gelvia	Kepala Desa	S1	49
2	Yuliana	Sekretaris Desa	S1	35
3	Hasnati	Ketua BPD	SMA	37
4	Dada	Anggota BPD	SMA	33
5	Oldrin A T	Anggota BPD	SMA	57
6	Dihel	Anggota BPD	SMA	59
7	Yusmandoto	Anggota BPD	SMA	46
8	Maiyani	Kepala seksi pemerintahan	SMA	37
9	Sisie	Merangkap dua jabatan Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan dan kepala urusan umum dan perencanaan	S1	35
10	Sontok	Kepala urusan keuangan	SMA	50
11	Inelson	Ketua RW 01	SMP	54
12	Sigit	Ketua RT 01	SMA	29
13	Tono nanyan	Ketua RT 02	SMP	42
14	Zainal	Ketua RT 03	SMA	38

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa struktur Pemerintah Desa Tumbang Langgah berjumlah 14 orang dan

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan di Desa Tumbang Langgah bahwa semuanya aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

13. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan kebijakan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga yang mereka tempatkan, sebagai representasi dari masyarakat. Oleh karena itu dapat dilihat keadaan pemerintahan yang ada di Desa Tumbang Langgah.

Tabel 2. 10 Lembaga Pemerintahan Desa Tumbang Langgah

No	Nama Lembaga	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pengurus	Keterangan
1	LKMD/LPM	2	-	Aktif
2	PKK	4	1	Aktif
3	Karang Taruna	1	1	Aktif
4	RT	4	1	Aktif
5	RW	4	1	Aktif
6	Lembaga Adat	4	1	Aktif
	Total	19	5	Aktif

Sumber: Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Berdasarkan tabel 10.7 di atas tampak masih kurangnya jumlah pengurus lembaga pemerintahan desa tumbang langgah dan jika dilihat dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan desa tumbang langgah.

14. Data Keuangan

Data keuangan adalah catatan informasi keuangan Desa Tumbang Langgah yang dapat menggambarkan kinerja desa tersebut diukur dengan sumber dana yang diperoleh dengan jumlah anggaran yang dibuat untuk penanganan *stunting*, adapun sumber keuangan Desa Tumbang Langgah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Data Keuangan Desa Tumbang Langgah

No	Anggaran Desa	Jumlah
1	Bantuan Pemerintah Pusat	Rp. 721.283.000,00
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 392.540.420,00
3	Anggaran <i>Stunting</i>	Rp. 8.000.000

Sumber: Data Monografi Desa Tumbang Langgah 2021

Dari data di atas kita dapat dilihat bahwa satu-satunya sumber keuangan desa tumbang langgah adalah berasal dari Pusat dan Kabupaten/Kota oleh karena itu penting bagi Desa meningkatkan kreatifitas dalam meningkatkan sumber penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan Desa. Namu setelah adanya kasus *stunting* sehingga pemerintah desa membuat kebijakan yaitu berupa anggaran sebagai upaya untuk menangani dan pencegahan *stunting*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas. Hal ini dilihat dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa indikator yang sesuai dengan ruang lingkup yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang langgah dapat dilihat sudah memiliki kebijakan serta upaya untuk penanganan *stunting* dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan kader posyandu dan kader KPM melalui kegiatan yang diselenggarakan, dan didukung oleh tenaga kesehatan dengan anggaran yang ada.
2. Perencanaan Program Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah. Sudah mempunyai beberapa program pemenuhan gizi nabati yaitu pemberian makanan tambahan yang bergizi dan vitamin program berkebun singkong,ubi namun untuk program pemenuhan gizi dari protein hewani belum ada dilakukan padahal protein dari hewani sangat bagus untuk pemenuhan gizi pada anak balita.
3. Sosialisasi Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah sosialisasi dilakukan tidak hanya berupa

penyampaian tentang pencegahan dan penanganan *stunting* akan tetapi juga ada berupa praktek pengolahan makanan bergizi seperti makanan tumbuhan ubi, singkong untuk peningkatan perbaikan kualitas gizi pada anak balita yang masih bersifat nabati sedangkan untuk hewani belum dilakukan.

4. Tindakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah dapat diketahui dari bentuk segi upaya dan cara pemerintah desa yang telah dilakukan untuk penanganan *stunting* memang sudah ada namun yang menjadi kendala pemerintah desa dalam melakukan tindakan adalah kurangnya dukungan, partisipasi dan pengertian yang baik dari masyarakat yang SDM relatif rendah dan dasar Pendidikan yang sangat minim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penanganan *Stunting* di Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas terdapat beberapa saran yaitu:

1. Pentingnya untuk Pemerintah Desa agar dapat segera membuat Peraturan Desa tentang *stunting* mengingat angka *stunting* yang cukup besar di Desa Tumbang Langgah.
2. Pentingnya untuk pemerintah desa dalam melakukan program pemenuhan gizi yang dilakukan tidak hanya dari nabati saja akan tetapi dari protein hewani juga sangat penting untuk menyeimbangi pemenuhan gizi pada balita. Dengan memanfaatkan ekosistem

sungai yang ada di Desa Tumbang langgah itu dapat dimanfaatkan untuk program beternak ikan.

3. Diharapkan kepada penyelenggara sosialisasi tidak hanya melakukan aksi berupa praktek pengolahan makan bergizi dari nabati saja. Akan tetapi perlu juga dari hewani yang juga dilakukan berupa aksi praktek pengolahan dari protein daging. Sehingga masyarakat dapat mengetahui cara untuk pengolahan makanan bergizi baik dari nabati dan hewani. Selanjtnya penting untuk pemerintah desa dan penyelenggara sosialisasi dari kabupaten untuk menjadi fasilitator yang mampu untuk meningkatkan suasana ruang diskusi yang menarik sehingga masyarakat dapat aktif untuk menyampaikan pendapat dan sarannya.
4. Sangat diharapkan dukungan serta keterlibatan masyarakat yang baik agar dapat menunjang kegiatan dan program-program yang dilakukan pemerintah desa untuk penanganan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal :

Agus Hendrar R. dan A. M. A. Abdul Hadi, 2013. *Kajian Stunting Pada Anak Balita Ditinjau Dari Pemberian Asi Eksklusif, Mp-Asi, Status Imunisasi Dan Karakteristik Keluarga Di Kota Banda Aceh*. Program studi Gizi Politeknik Kesehatan. Banda Aceh

Fallo, Rodina Adriana, 2020. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie*. Program Studi Ilmu Administrasi Kupang

Higau Clement. B. Heden 2015. *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*. Kalimantan timur

Iren R. dan R. G. P Djurubassa 2020. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting*. Program studi Ilmu Pemerintahan Maluku Utara

Mirawati T. E dan H. Marselina 2020. *Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan*. Program studi Kesehatan Masyarakat Banggai Kepulauan

Nisa, Latifa Suhada, 2018. *Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia Stunting Prevention Policies In Indonesia*. Kalimantan selatan

Roja, kostadia yunita san, 2017. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sikka*. Program studi ilmu pemerintahan. Nusa Tenggara Timur.

Silpia, Febi Rama, 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Stunting Gangguan Pertumbuhan Pada Anak Di Desa Pancasila*. Program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Lampung

Sumber Buku :

Cresswell, John W, 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

L. M. G Muhammad Y. I, 2020. *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*.

Makassar

Moleong, Lexy J, 2009. *Metode penelitian kualitatif* Bandung: Remaja

Rosdakarya

M. Junaidi Ghany & Fauzan Almanshur, 2014. *Metodologi Penelitian*

Kualitatif Jogjakarta

Raco, J R, 2010. *Metode penelitian kualitatif* Jakarta: PT. Grasindo

Sulastri, Andi Sri, 2020. *Model Perumusan Kebijakan Stunting Di Desa*

Labbo Kabupaten Bantaeng. Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Makassar

Sugiyono, 2008. *Memahami penelitian kualitatif* Bandung: CV. Alfabeta

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang

Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tentang
Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Berskala Desa.

Website :

<http://repository.uma.ac.id> di akses tanggal 04 november 2021

<http://eprints.umm.ac.id> di akses 09 november 2021

<https://idtesis.com/teori> lengkap implementasi kebijakan di desa. di akses 11

januari 2022